

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda di Bali dari tahun 1850 – 1942 menarik untuk terus dipelajari. Ada hal lain yang belum diketahui masyarakat awam terkait dampak dari praktek penjajahan, dalam hal ini adalah kolonialisme yang telah mereka lakukan. Praktek kolonialisme sebagaimana dijelaskan oleh Miftakhuddin (2019) adalah sebuah paham pendelegasian kekuatan politik ke luar wilayah yang sah untuk memberdayakan wilayah lain. Sehingga menyebabkan bergesernya tatanan sosial akibat hegemoni yang dilakukan oleh pelaku koloni tersebut. Lebih jauh lagi, hal ini menyebabkan wilayah terjajah akan menjadi bagian dari negara induk. Praktek demikian memang lumrah terutama pada abad ke-19 di seluruh dunia, yang merupakan puncak kolonialisme dalam memperoleh sumber daya di negeri bangsa lain melalui jalur perdagangan, politik dan militer. Namun praktek kolonisasi kerap kali menemui celah konflik baik antara sesama kolonis (didominasi bangsa Eropa Barat) akibat persaingan sesamanya secara ekonomi atau politik ataupun perlawanan dari masyarakat di negeri yang mereka duduki. Salah satu bangsa yang menerapkan kolonisasi yang melakukan eksploitasi cukup unik untuk dibahas.

Dalam sejarahnya, Belanda melakukan praktek penjajahan dengan sistem desentralisasi (*Indirect Rule*). Namun sebelum Politik Etis, sistem pemerintahan sentralistik di koloni Belanda (Nusantara) dianggap sebagai cara terbaik memperoleh keuntungan maksimal (Miftakhuddin,2019). Namun sistem tersebut

beralih ke desentralistik dengan melibatkan perangkat lokal yang diberikan pendidikan Belanda untuk kaum Bumiputera dalam rangka menambah tenaga kerja dengan pengetahuan terbatas dan upah yang murah (salah satu kebijakan politik etis, *Edukasi*). Pola penjajahan seperti itulah yang dilakukan Belanda terhadap penduduk bumiputera.

Bali dijadikan wilayah yang dikuasai secara politik ketika Belanda melancarkan kebijakan *Pax Neerlandica*, yaitu kebijakan politik yang bertujuan untuk membulatkan kekuasaan di negeri jajahan, setelah mengalahkan beberapa raja yang berkuasa di Bali dalam pertempuran Jagaraga (1848), Puputan Badung (1906) dan Puputan Klungkung (1908). Uniknya, praktek penjajahan yang dilakukan adalah penjajahan berbasis budaya yang dikenal sebagai *Baliseering*. (Ardhana,2013:74)

*Baliseering* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan politik kolonial untuk menjadikan Bali sebagai museum hidup. Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa cara, dua diantaranya adalah mempersiapkan objek-objek wisata budaya untuk menarik wisatawan mancanegara, serta melakukan hegemoni melalui pendidikan formal dan non-formal, dengan memberikan simbol penanda hegemoni dan dominasi Barat (Pageh,2015:179)

Asumsi pemerintah kolonial adalah bahwa Hindu merupakan praktek religi kehidupan tradisi dan kesenian masyarakat mampu menjamin keutuhan masyarakat. Namun sebenarnya Belanda memiliki tujuan sendiri dibalik pemberlakuan *Baliseering* ini. Bagi pemerintah kolonial Belanda, strategi penguasaan dari sifat penaklukan ke diplomasi budaya adalah upaya *Baliseering* ini

untuk membendung pengaruh nasionalisme di Jawa, upaya persebaran agama baik Islam maupun Kristen. Hal ini didasarkan pada kondisi sosial yang terjadi waktu itu. Pengaruh nasionalisme yang berkembang dari Jawa didapatkan melalui pendidikan. Meskipun pada awalnya Belanda menerapkan kebijakan pendidikan untuk kepentingan administrasi kolonial, namun kesadaran yang muncul akibat dampak pendidikan Belanda dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi Belanda sendiri. Pengetahuan dan kompetensi potensial hingga menjadi modal untuk melawan adalah paradigma yang mendasari ketakutan kolonial. Maka dari itu pendidikan zaman kolonial diperketat, jumlah sekolah yang tersebar dibatasi, jenis, dan tingkatan sekolah disesuaikan untuk kepentingan birokrasi dan pekerjaan yang dijalankan oleh Bumiputera (Pageh,2015:145).

Peran pemerintah kolonial dalam menghambat transformasi sosial kultural yang disinyalir mengarah pada perlawanan dilakukan dengan berbagai cara strategis melalui beberapa kebijakan untuk membendung publik memasuki jenjang sekolah tinggi. Pemerintah kolonial menerapkan syarat-syarat ketat seperti biaya sekolah yang tinggi, dan penghasilan harus setara dengan seorang *Punggawa* supaya transformasi sosial tidak mengarah ke perubahan struktural seperti yang terjadi di luar Bali. Di satu sisi, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam pendidikan yang mengarah pada penguatan etnosentris seperti membuat kurikulum menyesuaikan program *Baliseering* , mengadakan kurikulum ekstra seperti menggambar, menyanyi dan menari Bali, hingga membangun gedung-gedung harus bermotif Bali (Pageh,2015:147).

Strategi ini dilakukan melalui promosi kebudayaan ke luar negeri, dengan mengangkat kearifan lokal budaya Bali diatas panggung dunia. Pemerintah kolonial

mengangkat para sarjana lulusan Belanda untuk meneliti tentang aspek hukum adat, sosial, budaya, dan sosial sebagai dukungan usaha penggalan dan penemuan terhadap kebudayaan Bali. Pemerintah Belanda telah merekonstruksi ruang Bali sebagai ruang wisata sejarah dan budaya. Maka keunikan, dan kemuliaan masa lalu Bali dijadikan promosinya. Berkat promosi yang telah dilakukan, akhirnya Bali semakin dikenal untuk dikunjungi turis. Wisatawan mancanegara mulai berdatangan untuk melihat langsung keunikan tradisi, eksotisme alam pedesaan dan candi peninggalan zaman Bali Kuno.

Sebagai akibat dari kebijakan *Baliseering* terutama dalam hal pariwisata, seringkali peninggalan sejarah Bali diangkut keluar negeri asal wisatawan sebagai cinderamata sebagai tanda bahwa mereka pernah mengunjungi Bali. Inilah yang mendorong Mr. W.F.J Kroom yang saat itu menjadi Asisten Residen Bali yang berkedudukan di Singaraja, memerintahkan Kúrt Grundler, seorang arsitek kebangsaan Jerman untuk bekerjasama dengan arsitek tradisional Bali (*undagi*) untuk membangun sebuah bangunan yang nantinya digunakan sebagai tempat penampungan dan penyelamatan warisan Budaya Bali (Arthanegara. 1982;19).

Oleh karena itulah untuk menyelamatkan hasil budaya berupa artefak-artefak yang merupakan peninggalan yang sangat kaya akan warisan adiluhung maka dibangunlah suatu tempat penampungan sebagai ruang pajang untuk tempat konservasi budaya. Saat itulah gagasan pembangunan museum mulai dilakukan. Bangunan tersebut mesti memenuhi prasyarat sebagai museum, mereka mempertimbangkan tata ruang, sistem pencahayaan, keamanan, dll. Salah satu hambatan paling besar adalah erupsi gunung Batur pada 1917 yang hampir menghilangkan semangat mereka. Guncangan gempa yang dihasilkan saat gunung

tersebut erupsi sempat merubuhkan bangunan dan harus direstorasi secepatnya. Namun demikian berkat keteguhan dan partisipasi masyarakat tentang betapa besarnya manfaat museum tidaklah menjadi penghalang.

Untuk menjamin kelancaran pengelolaan maka dibentuklah sebuah pengurus yang beranggotakan Dr. Stutterheim, Walter Spies, Dr. R. Goris, Ir. Th. A. Resink dan pemuka kebudayaan Bali seperti I Gusti Alit Ngurah dan I Gusti Bagus Negara. Mereka dipercayakan tanggung jawab dalam mengemban dan mencegah kemunduran serta mengalirnya peninggalan kebendaan Bali ke luar. Yayasan Bali Museum di Denpasar dibentuk dan bertugas mempersiapkan segala kelengkapan seperti sarana prasarana dan koleksi yang dihimpun oleh orang-orang tersebut diatas. Selain itu pendirian beberapa buah gedung seperti perpustakaan, gedung pameran, ruang laboratorium melengkapi bangunan yang ada menunjukkan betapa pentingnya fungsi museum sebagai pembuktian sejarah, fakta tentang kebesaran untuk dilestarikan oleh penerus bangsa (Arthanegara,1982:21).

Berhubungan dengan fungsi museum, Hasan (2012:171) memaparkan bahwa museum adalah tonggak kebudayaan masa lalu dengan masa kini melalui pendekatan rekreasi serta edukasi, tentunya sebagai sumber belajar sejarah secara langsung. Untuk mengaitkan hubungan antara Museum Bali sebagai tempat konservasi peninggalan sejarah dengan potensinya sebagai sumber belajar sejarah perlu diketahui terlebih dahulu mengenai kondisi pembelajaran dewasa ini. Tujuan pembelajaran sejarah diterjemahkan dari silabus mata pelajaran sejarah pada KI3 yakni untuk membekali peserta didik dengan keterampilan dan cara berpikir sejarah, membentuk kesadaran bersejarah, nilai kebangsaan, mengaitkan peristiwa lokal, nasional dan global dalam satu rangkaian sejarah (Kemendikbud, 2016:2)

nampaknya belum bisa terpenuhi secara ideal, karena peserta didik cenderung mengenal pelajaran sejarah sebagai pelajaran yang membosankan. Ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: 1) pembelajaran sejarah cenderung monoton, 2) ketidaktahuan guru akan kedudukan pelajaran sejarah (Santoso,2017:32). Kondisi demikian juga diperburuk keadaan yang sangat mendasar seperti semisal peserta didik tidak memperhatikan guru dalam menjelaskan, hal ini terjadi disebabkan oleh pemanfaatan sumber belajar yang kurang maksimal terutama oleh guru sejarah sehingga agak sulit menarik perhatian peserta didik dalam kegiatan belajar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Guru Sejarah kelas X SMAN 3 Denpasar, Made Arsa Dwipayana sebagai berikut:

“...cukup sulit bagi kami guru sejarah terutama dalam memanfaatkan sumber belajar. Selain itu juga murid-murid juga *bosen* melulu kalau dikasih ceramah. Saya sendiri sebenarnya juga merasa sedikit keberatan dalam menyampaikan materi, tapi bagi saya itu adalah sebuah tantangan.” (wawancara *via* telepon, Februari 2021)

Maka dari itu, Museum Bali dapat digunakan sebagai sumber belajar sejarah dalam rangka meningkatkan minat peserta didik untuk belajar sejarah. Seperti yang dijelaskan oleh Hasan (2012) bahwa museum sebagai sumber tidak ternilai yang memberikan kemungkinan tidak terbatas untuk peserta didik untuk diarahkan pada “*learning by observing*” pada berbagai hasil karya dan prestasi bangsanya. Museum Bali menawarkan hal lain yang tidak tercantum dalam pembelajaran di kelas. Semisal informasi tentang cara Belanda dalam mengeksploitasi Bali ternyata tidak sama dengan yang mereka lakukan di daerah lain, semisal Jawa dan Sumatera. Analisis tersebut tidak dijelaskan dalam buku pelajaran sejarah SMA, baik buku teks ataupun *LKS*. Sejarah berdirinya museum ini, struktur bangunan, serta koleksinya yang antik bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar dengan menyajikan konsep belajar di luar kelas, terlebih lagi koleksi museum merupakan

sumber belajar konkrit bagi peserta didik yang dapat mengurangi verbalistik belajar sejarah. Pengalaman langsung terhadap koleksi museum akan memberikan kesempatan untuk peserta didik supaya mengagumi masyarakat yang menghasilkannya, mampu mengetahui bagaimana suatu karya dihasilkan, pemanfaatan Museum Bali sebagai sumber belajar sejarah juga akan melatih cara berpikir kritis peserta didik, juga mengasah kemampuan mereka menjadi sejarawan kecil dengan kemampuan yang diharapkan dalam Kompetensi Inti. Untuk itu, peserta didik dituntut mampu memenuhi tujuan belajar sejarah seperti yang telah dijelaskan diatas, tentunya ini merupakan sebuah tantangan tentunya bagi guru sebagai perantara ilmu, dan juga peserta didik. Dengan cara belajar seperti ini diharapkan mampu membawa peserta didik lebih kenal dan menghayati lingkungan masyarakat sekitar karena mereka juga adalah bagian dari masyarakat itu sendiri (Hasan,2012:177).

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis, terdapat beberapa jenis penelitian yang serupa. Diantaranya adalah; Maulana Yusuf A, dkk dari Universitas Negeri Jakarta dengan judul penelitian “Pemanfaatan Museum sebagai Sumber Belajar Sejarah”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian tersebut yaitu untuk pembelajaran sejarah, lalu teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi pustaka/dokumen, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang berbeda berupa peranan guru sejarah dalam memanfaatkan museum sebagai sumber belajar sejarah.

Made Wisnu Dwipayani dari Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja (2015) dengan judul penelitian “Potensi Museum *The Sukarno Center* Tampaksiring, Gianyar, Bali Sebagai Sumber Belajar Sejarah di SMA”. Penelitian tersebut berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Relevansinya dengan penelitian ini adalah kesamaan aspek yang dibahas berupa sejarah berdirinya museum tersebut, struktur bangunan dan penelitian ditujukan sebagai sumber belajar sejarah di SMA. Perbedaan penelitian adalah objek museum yang berbeda lokasi penelitiannya dengan penelitian penulis.

Indra Saputra dari Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja dengan judul penelitian “Museum Palagan Bojongkasan, di Kecamatan Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat (Sejarah, Nilai-Nilai dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sejarah di SMA)”. Penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan relevansi penelitian berupa analisis sejarah berdirinya museum tersebut dan aspeknya yang bisa dijadikan sumber belajar sejarah. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian Indra Saputra yang berjudul “Museum Palagan Bojongkokosan, di Kecamatan Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat (Sejarah, Nilai-Nilai dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sejarah di SMA)” ini tidak menggambarkan struktur bangunan museum dalam penjelasannya.

Maka dari itu, berdasarkan komparasi penelitian-penelitian sejenis yang telah disebutkan diatas, penulis mengkaji lebih dalam lagi mengenai sejarah Museum Bali di Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan judul “**Museum Bali di Kota Denpasar, Bali (Latar Belakang Sejarah, Koleksi, dan Potensinya sebagai Sumber Belajar)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Mengapa Belanda membangun Museum Bali ?
- 1.2.2 Bagaimana struktur bangunan Museum Bali ?
- 1.2.3 Apa saja koleksi dari Museum Bali yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 untuk mengetahui sejarah berdirinya Museum Bali.
- 1.3.2 untuk mengetahui struktur bangunan Museum Bali.
- 1.3.3 untuk mengetahui koleksi dari Museum Bali yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoretis

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan dan memahami tentang Museum Bali, koleksi dan potensinya untuk digunakan sebagai sumber belajar. Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tugas penelitian.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat khususnya generasi muda, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang arti penting sebuah museum, bukan

sekadar sebagai tempat memajang koleksi benda antic, namun bagaimana mengupayakannya sebagai sumber dan media belajar.

- b. Bagi peneliti lain diharapkan mendapatkan wawasan yang sama dan merangsang generasi yang berminat untuk melakukan penelitian sejenis atau menelaah masalah kesejarahan yang bisa dimuat dengan memanfaatkan Museum Bali sebagai sandaran utamanya.
- c. Bagi pemerintah Kota Denpasar, diharapkan agar mampu terus menjaga dan melestarikan semua budaya yang ada khususnya yang dimuat dalam Museum Bali hingga dapat menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda.
- d. Bagi lembaga atau jurusan, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terhadap mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu sejarah yang membahas tentang Museum Bali

